



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kegiatan dan untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 359 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

24. Peraturan . . .

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
26. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 96);
27. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 37), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 97 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA
STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PATI TAHUN 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Dimana didalamnya memuat tentang tatacara perubahan pada dokumen perencanaan padatingkat kementrian dan lembaga baik pada tingkat pusat, provinsi maupun pada tingkat Kabupaten. Dimana didalamnya diatur mengenai perubahan RPJMD pada tingkatpemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan pada Renstra pada setiap OPD.

Terjadinya perubahan RPJMD yang berimbas pada perubahan Renstra OPD disebabkan oleh disahkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Undang-Undang tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini kemudian berimplikasi pada perubahan beban tugas dan strukturorganisasi yang melaksanakan kewenangan tersebut.

Dokumen Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD yang merupakan revisi dari dokumen renstra awal untuk periode 5 tahun kedepan. Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan (Renstra Diskan) tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran/tujuan pembangunan urusan perikanan selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah mengalami perubahan.

Renstra PD berkedudukan dan berfungsi sebagai:

- (1) Acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) pada setiap tahun anggaran; dan

(2) Rancangan Awal Renstra PD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Renstra PD disusun melalui tahapan kegiatan sebagai berikut: (i) Persiapan;(ii) Penyusunan Rancangan Renstra PD; (iii) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD; dan(iv) Penetapan Renstra PD.

Renstra PD merupakan dokumen yang saling terkait dan tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen Renstra PD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode perencanaan lima tahunan. Selanjutnya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah menjadi acuan bagi PD dimaksud dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) PD pada setiap tahun anggaran.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Pati di bidang kelautan dan perikanan dan disesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan RPJM Kementrian dan Kelautan Perikanan sehingga akan terjadi kesesuaian rencana pembangunan di setiap tingkatan, khususnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.

Sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dan pengendalian terhadap dokumen RENSTRA 2017-2022, serta amanat peraturan perundangan yang berlaku diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tertera dalam pasal 343 ayat (9) PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah, Pasal tersebut sebagai dasar penyesuaian kegiatan dalam perubahan RENSTRA. Berikutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah diamanatkan setiap Perangkat Daerah agar melaksanakan pemetaan dari program/kegiatan lama ke Program/kegiatan/sub kegiatan baru. Amanat tersebut mengakibatkan terjadinya perbaikan indikator kegiatan yang masih bersifat hasil aktivitas, hal tersebutlah yang mendasari adanya perbaikan dan penajaman indikator output serta penyesuaian target kegiatan dalam perubahan RENSTRA.

IV.1 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 – 2022 disusun mengacu pada sejumlah peraturan-perundangan yang digunakan sebagai rujukan, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pati Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
31. Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 43);
32. Peraturan Bupati Pati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

IV.2 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud ditetapkan Perubahannya RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.3.2. Tujuan

Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017 –2022 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Tujuan disusunnya Perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 adalah memberikan pedoman bagi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam penyusunan RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.

IV.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang perubahan RENSTRA, landasan hukum penyusunan renstra, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan PD terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, sumber daya yang dimiliki dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan yang dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra pada tahun yang sudah dilalui (2018, 2019) karena RENSTRA

saat ini adalah RENSTRA perubahan, dan tantangan serta peluang pengembangan pelayanan Tahun 2020-2022;

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan pelayanan PD Kabupaten Pati berdasarkan tugas dan fungsinya; telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; telaahan Renstra PD yang terkait Kecamatan; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis;

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah PD Kabupaten Pati;

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD Kabupaten Pati dalam 5 (lima) tahun;

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai PD Kabupaten Pati dalam kurun 5 (lima) tahun sebagai komitmen mendukung tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

V.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Pati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan, dijabarkan tugas, pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

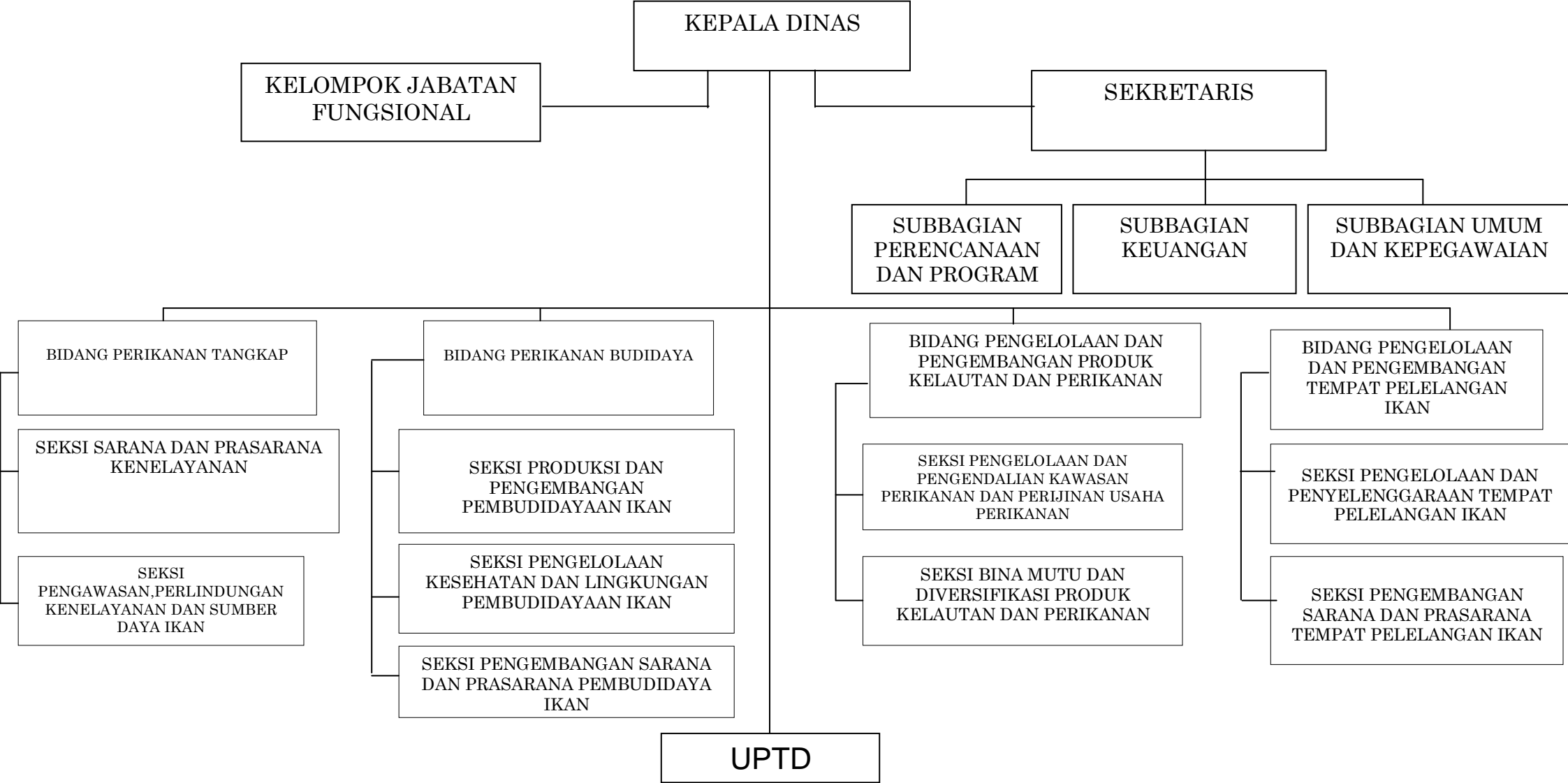
b. Fungsi

Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas, pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar II.1 Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati



Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Perencanaan dan Program;
 2. Subbag Keuangan;
 3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perikanan Tangkap
 1. Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
 2. Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;
- d. Bidang Perikanan Budidaya
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;
- e. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- f. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
 1. Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;
- g. Kelompok jabatan fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Berdasarkan Susunan Struktur Organisasi yang telah disebutkan sebelumnya masing-masing unsur dalam Organisasi mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program bidang kelautan dan perikanan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;

- d. Pengawasan bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Perumusan kebijakan, pengkoordinasian dan pengendalian bidang kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan;
- h. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; dan
- i. Pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekretaris dalam menjalankan tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang perencanaan dan program;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang keuangan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian.

Sekretariat, membawahkan 3 (tiga) subbagian, yaitu subbagian Perencanaan dan Program; subbagian Keuangan; dan subbagian Umum Dan Kepegawaian.

C. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Pemberdayaan Kenelayanan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kenelayanan Serta Pengawasan Perlindungan Kenelayanan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Sarana dan Prasarana Kenelayanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan;

Bidang Tangkap membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Kenelayanan dan Seksi Pengawasan, Perlindungan Kenelayanan dan Sumber Daya Ikan.

D. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas Menyiapkan perumusan kebijakan teknis, produksi dan usaha perikanan budidaya, pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya serta pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan.

Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Produksi dan Pengembangan Pembudidayaan Ikan, Seksi Pengelolaan Kesehatan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan, dan Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan;

E. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan serta Pengembangan dan Perijinan Usaha Perikanan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan Kawasan Perikanan dan Perizinan Usaha Perikanan dan Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;

F. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas Menyiapkan rumusan kebijakan teknis bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, Pemasaran dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu Seksi Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Tempat Pelelangan Ikan;

G. Kelompok jabatan fungsional

H. Unit Pelaksana Teknis Dinas

V.2 Sumber Daya Dinas Kelautan Dan Perikanan

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan kelautan dan perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 55 orang personel (Data sampai Desember 2019), terdiri atas 38 orang laki-laki dan 17 perempuan. Secara rinci jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut berikut :

Jumlah PNS : 55 orang, terdiri dari :

1. Pejabat Struktural : 20 orang
2. Fungsional Umum : 35 orang

Jumlah PNS menurut golongan

1. Golongan I : - orang
2. Golongan II : 23 orang
3. Golongan III : 26 orang
4. Golongan IV : 6 orang

Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

1. SD : 0 orang
2. SLTP : 0 orang
3. SLTA : 24 orang
4. Sarjana Muda : 3 orang
5. Sarjana : 17 orang
6. Pasca Sarjana : 11 orang

Jumlah Penyuluh Perikanan PNS (Pegawai Pusat) : 19 orang

Jumlah PPB (Penyuluh Perikanan Bantu) Tenaga Kontrak Pusat : 17 orang.

Jumlah tenaga kontrak dan harian lepas : 146 orang (130 orang tersebar di 8 TPI dan 5 BBBI).

Selain sumber daya manusia sejumlah aset pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedinasan meliputi aset bergerak berupa kendaraan (roda empat dan roda dua), peralatan kantor (komputer, printer, LCD projector, lemari arsip, meja-kursi kantor, dll)

dan aset tidak bergerak meliputi tanah, gedung perkantoran/bangunan. Deskripsi lengkap aset/modal fisik Dinas Kelautan sebagaimana tabel II.1 dan tabel II.2 berikut ini.

Tabel II.1
Aset Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

<i>No</i>	<i>Nama Aset</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Kondisi</i>
1	Mobil dinas	10	Baik
2	Sepeda motor dinas	58	Baik
3	Traktor	4	Baik
4	Genset	7	Baik
5	Pompa Air	13	Baik
6	Excavator/ Bego	2	Baik
7	Alat2 laboratorium	33	Baik
8	Mesin ketik manual	4	Baik
9	Almari	88	Baik
10	Meja	219	Baik
11	Kursi	693	Baik
12	Filling kabinet	30	Baik
13	Tabung pemadam	7	Baik
14	Timbangan	12	Baik
15	Lemari es	4	Baik
16	Freezer	1	Baik
17	Komputer/ PC	32	Baik
18	Laptop	63	Baik
19	Printer	65	Baik
20	AC	30	Baik
21	LCD proyektor	9	Baik
22	Kamera digital	7	Baik
23	Handycam	3	Baik
24	Wireless	3	Baik
25	Sound system	6	Baik
26	Televisi	4	Baik
27	Mesin finger print	11	Baik
28	Mesin potong rumput	2	Baik
29	Rak Arsip	8	Baik
30	CCTV	30	Baik
31	Hand phone	3	Baik
32	TV	9	Baik

Tabel II.2
Aset Tidak Bergerak Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Nama Tanah/ Bangunan	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Ket
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.479	817	
2	TPI Juwana Unit I	6.463	2.325	
3	TPI Juwana Unit II	40.000	3.680	
4	TPI Banyutowo	2.351	2.351	
5	TPI Puncel	420	214	
6	TPI Sambiroto	506	132	
7	TPI Margomulyo	271	84	
8	TPI Pecangaan	300	275	
9	TPI Alasdowo	120	72	
10	BBI Brati	14.180	639	
11	BBI Sukolilo	11.000	107,75	
12	BBI Tlogowungu	19.789	178	
13	Tambak Dinas Margomulyo	4.500	36	Bangunan gudang
14	Tambak Dinas Dororejo	4.100	81	Bangunan Handling splis
15	Laboratorium POSIKANDU	-	54	Berada di lahan tambak dinas Dororejo

Potensi Bidang Kelautan dan Perikanan

- Luas Wilayah Kawasan Pesisir : 37.943 Ha
- Jumlah Kecamatan Kawasan Pesisir : 7 kec.
- Jumlah Desa Kawasan Pesisir : 136 desa
- Panjang Pantai : 60 mil
- Luas Tambak Garam : 2.901.62 Ha
- Luas Potensi Mangrove : 8.906.352 Ha
- Luas Eksisting Mangrove : 225,39 Ha
- Terumbu Karang Buatan
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²
 - Pantai Desa Lengkong : 450 m²
 - Muara Sungai Juwana : 450 m²

- Rumpon Pantai Banyutowo : 4.400 m²
- Kelompok Pembudidaya Garam
 - Jumlah Kelompok PUGAR : 976 kelompok
 - Jumlah Kecamatan : 4 kec.
 - Jumlah Desa : 20 desa
- Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUB)
 - Berbadan Hukum : 130 KUB
 - KUB BH Kemenkumham : 25 KUB
 - KUB BH Notaris : 35 KUB
- Koperasi Nelayan Berbadan Hukum : 8

Tabel II.3
Jumlah PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1	SD	0 org	
2	SLTP	0 org	
3	SLTA	24 org	
4	Diploma	3 org	
5	Sarjana	17 org	
6	Pasca Sarjana	11 org	
	JUMLAH	55 org	

Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari 20 orang pejabat struktural, 35 jabatan fungsional umum. Selain itu juga didukung adanya jabatan fungsional yaitu Penyuluh Perikanan sebanyak 19 orang dan 17 orang PenyuluhPerikanan Bantu yang merupakan pegawai pusat. Selain itu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ditunjang dengan kelengkapan prasarana yang meliputi: Gedung Kantor 1 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 3 unit, TPI/PPI 8 unit, Pos Pelayanan Ikan Terpadu 1 unit, dan Tempat Penanganan Hasil Ikan 1 unit.

V.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan
II.3.1 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat lebih terarah baik dari segi administratif dapat memenuhi persyaratan

yang dapat di pertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang sangat terbatas. Dengan demikian perencanaan yang di lakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan teknis serta penyusunan program dan kegiatan teknis dan strategis dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan;
2. Memberikan pelayanan umum, baik berupa pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun kepada instansi vertikal atau horizontal.;
3. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang kelautan dan perikanan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, Provinsi, atau APBN.

Terkait dengan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati selama dua tahun sebelumnya, pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun periode 2018-2019 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten pati

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor perikanan	5,53%	2,53	3,31	27,51	85,47	10,87	25,82
2	Produktivitas perikanan tangkap	13,54%	13,16	13,21	9,02	26,83	0,68	2,03
3	Produktivitas perikanan budidaya	3,93%	3,90	3,9	4,02	16,04	1,03	4,11
4	Produktivitas garam rakyat	114,3%	74,54	81,5	112,8	120,88	1,51	1,48
5	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	3,71%	4,45	3,51	2,18	3,55*	0,49	1,01
6	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	0,60%	0,20	0,30	10,62	5,56	53,10	18,53
7	Produksi garam	326.382,65 ton	212.858,25	232.725,02	320.228,58	350.761,32	1,50	1,50
8	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	8,33%	6,25	6,67	7,69	30,8	1,23	4,62
9	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0,26%	0,09	0,09	6,9	0,33	76,67	3,67
10	Luasan eksisting lahan mangrove	199,98 Ha	176,88	180,43	184,74	225,39	1,04	1,25
11	Pertumbuhan produksi garam	7%	7	-	176,92	-	25,27	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja	Target Renstra OPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	produksi perikanan budidaya	42.775 ton	42290	42.400	43.608,04	46.140,11	1,03	1,09
13	<i>udang windu</i>	<i>780 ton</i>	755	760	811,64	778,30	1,07	1,02
14	<i>bandeng</i>	<i>28.100 ton</i>	28040	28.050	26.026,53	28.135,68	0,93	1,00
15	<i>nila salin</i>	<i>710 ton</i>	550	600	3.356,64	3.928,29	6,10	6,55
16	<i>lele</i>	<i>11.650 ton</i>	11150	11.530	11.751,63	11.531,26	1,05	1,00
17	<i>ikan lain</i>	<i>1.535 ton</i>	1435	1.460	1.661,60	1.766,58	1,16	1,21
18	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	28,13%	23,08	25	30,77	47,06	1,33	1,88
19	Volume ikan yang dilelang di TPI	29.228,22 ton	28.005,00	28.228,71	23.517	34.768,82	0,84	1,23
20	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	100%	100	100	101,09	106,55	1,01	1,07
21	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	7,18%	5,52	6,19	25,28	27,74	4,58	4,48
22	Produksi olahan ikan	42.725,17 ton	41.811,24	42.090,64	115.448,40	126.444,60	2,76	3,00
23	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	8,70%	6,80	7,2	33,33	25	4,90	3,47

Capaian kinerja selama pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel II.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2018 dan 2019 berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagian besar sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2018 ada 4 indikator yang belum memenuhi target. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada tahun berkenaan, antara lain cuaca yaitu curah hujan dan gelombang laut yang mempengaruhi produksi perikanan tangkap. Berdasarkan Tabel II.4 dapat dilihat bahwa produksi perikanan tangkap maupun produktifitasnya belum memenuhi target.

Sektor Perikanan Laut sangat terpengaruh erat dengan berbagai perubahan kondisi alam yang kini terus menekan hasil tangkapan ikan di laut. Berbagai faktor seperti ketidakpastian cuaca, kondisi cuaca ekstrem, kenaikan suhu permukaan laut (sea surface temperature-SST), naik turunnya harga bahan bakar serta perubahan arah angin, menurunkan tingkat produktivitas nelayan. Perubahan iklim juga turut memengaruhi distribusi dan penyebaran ikan di laut, sementara kenaikan harga bahan bakar akan memengaruhi kesempatan nelayan untuk menangkap ikan seiring dengan pergeseran penyebaran ikan yang terus berubah akibat perubahan iklim. Regulasi yang berubah-ubah juga turut mengakibatkan sebagian besar nelayan di Kabupaten Pati tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan.

Produksi perikanan budidaya di tahun 2018 pada dasarnya sudah memenuhi target tapi untuk komoditas ikan bandeng belum memenuhi target. hal itu dikarenakan pembudidaya ikan bandeng banyak yang beralih ke pembudidayaan ikan nila salin yang dinilai mempunyai produktifitas yang lebih tinggi dibanding dengan ikan bandeng.

Untuk indikator peningkatan angka konsumsi ikan di tahun 2018 belum dapat memenuhi target dikarenakan ada perubahan cara perhitungan oleh Tim Perumus Angka Konsumsi Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Walaupun peningkatan Angka Konsumsi Ikan belum memenuhi target tetapi Angka Konsumsi Ikan di Kabupaten Pati menempati urutan tertinggi di Jawa Tengah.

Indikator pertumbuhan produksi garam untuk tahun 2019 sudah tidak dipergunakan lagi karena di tahun 2019 program tersebut sudah dihapuskan dan dijadikan satu dengan program lainnya.

Ada beberapa faktor internal penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati periode Tahun 2018 antara lain adalah :

1. Keterbatasan SDM perangkat daerah baik kuantitas maupun kualitas.
2. Kualitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka untuk sinergitas pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan.
4. Belum efektifnya perencanaan program dan kegiatan khususnya dalam menentukan indikator kinerja yang dapat menunjukkan fokus dan lokus (sasaran) secara lebih tepat.
5. Jumlah anggaran tiap tahun yang belum sebanding dengan beban tugas yang diemban oleh perangkat daerah.

Adapun faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian target kinerja yang dilakukan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Pati di tahun 2019 antara lain:

1. Adanya koordinasi yang baik antara aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dengan pelaku usaha kelautan dan perikanan.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan memaksimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3. Adanya bantuan baik berupa dana maupun sarana dan prasarana kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan yang berasal dari APBN, APBD Propinsi maupun swasta.

Berikut Tabel II.5 secara lengkap yang menggambarkan perkembangan jumlah anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Pati Tahun 2018 dan 2019 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Tabel II.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat daerah
Dinas kelautan dan perikanan kabupaten pati

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Pertumbuhan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.325.665.000	1.707.661.000	1.408.029.000	1.432.141.000	1,06	0,84	28,82	1,71
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur	329.955.000	532.918.000	743.735.000	384.357.000	2,25	0,72	61,51	-48,32
Program peningkatan disiplin aparatur	38.000.000	48.790.000	39.600.000	100.200.000	1,04	2,05	28,39	153,03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000	24.395.000	10.000.000	20.000.000	1,00	0,82	143,95	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	97.285.000	125.752.000	97.285.000	115.000.000	1,00	0,91	29,26	18,21
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	75.000.000	150.000.000	75.000.000	415.000.000	1,00	2,77	100,00	453,33
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	25.000.000	150.000.000	25.000.000	50.000.000	1,00	0,33	500,00	100,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran		Pertumbuhan	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	150.000.000	150.264.000	50.000.000	155.000.000	0,33	1,03	0,18	210,00
Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	248.000.000	460.398.000	157.000.000	225.000.000	0,63	0,49	85,64	43,31
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	45.517.000	0	195.000.000	0	4,28	0,00	-100,00	-100,00
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	2.000.000.000	2.500.000.000	946.095.000	1.030.519.000	0,47	0,41	25,00	8,92
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	10.000.000.000	14.300.000.000	6.391.570.000	8.099.542.000	0,64	0,57	43,00	26,72
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	200.000.000	300.000.000	50.000.000	155.000.000	0,25	0,52	50,00	210,00
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	2.000.000.000	2.500.000.000	312.000.000	200.000.000	0,16	0,08	25,00	-35,90
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	215.000.000	2.400.000.000	1.658.255.000	1.378.410.000	7,71	0,57	1016,28	-16,88

Dari tabel II.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dapat dilihat hasil rasio realisasi anggaran dengan penganggaran. Dalam penentuan proyeksi anggaran di RENSTRA jumlah anggaran tiap – tiap perangkat daerah mengacu pada kapasitas riil anggran di RPJMD yang mana struktur anggarannya sudah dibagi dalam (P1) untuk program wajib mengikat, (P2) untuk program prioritas dan (P3) program pendukung visi dan misi kepala daerah (P3).

Hasil analisa dari rasio yang ada dapat disimpulkan pada tahun 2018 sebanyak 26,7% atau ada 4 program memiliki rasio 1 yang artinya jumlah target sama dengan realisasi. Untuk program yang memiliki rasio kurang dari 1 sebanyak 40%. Ada 6 program yang targetnya dibawah realisasi. Program yang 33,3% atau sebanyak 5 program memiliki rasio lebih dari satu yang menandakan realisasi lebih besar daripada target.

Analisa rasio realisasi anggaran dengan penganggaran pada tahun 2019 ditemukan bahwa program di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak ada yang mempunyai rasio 1. Dari sekian program sebanyak 80% atau 12 program yang rasio anggarannya dibawah 1, dan sisanya yaitu sebanyak 20% atau 3 program memiliki rasio diatas 1.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sehingga terdapat ketimpangan antara target yang telah disusun dengan realisasi yang terjadi di tahun pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Keterbatasan APBD maupun penghematan anggaran sehingga lebih diutamakan program yang prioritas.
2. Adanya permintaan dari masyarakat melalui musrenbang maupun reses dewan.
3. Perencanaan yang kurang tepat di awal penyusunan RENSTRA.

V.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan

sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

1. Tantangan

Dari telaah Rencana Jangka Menengah Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tantangannya adalah:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan;
- b) Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan;
- c) Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan;
- d) Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan;
- e) Tingginya harga pakan ikan;
- f) Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri;

2. Peluang

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a. Promosi GEMARIKAN;
- b. Berkembangnya industri perikanan;
- c. Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan;
- d. Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan;
- e. Berkembangnya teknologi pergaraman;
- f. Pembangunan gudang garam dan koperasi garam.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan secara rinci dapat dilihat dari tabel II.6 berikut ini.

Tabel II.6
Analisa Renstra Perangkat Daerah Untuk Tantangan dan Peluang

No	Analisa Renstra		Tantangan	Peluang
	Sasaran kementrian/ propinsi	Masalah OPD		
1.	Peningkatan konsumsi makan ikan (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya konsumsi ikan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan	Promosi GEMARIKAN
			Kurangnya nilai tambah produk pengolahan ikan	Berkembangnya industri perikanan
2	Peningkatan produksi ikan (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya produksi ikan	Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan	Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan
			Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan	Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan
			Tingginya harga pakan ikan	
3	Peningkatan produksi garam (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya produksi garam	Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri	Berkembangnya teknologi pergaraman
				Pembangunan gudang garam dan koperasi garam

V.5 Tantangan dan Peluang Terhadap RTRW dan KLHS

II.5.1 Tantangan dan Peluang Terhadap RTRW

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengacu pada tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dikaitkan dengan dokumen Ex-Ante RTRW maka telaah terhadap keselarasan RTRW tidak dilakukan.

II.5.2 Tantangan dan Peluang Terhadap KLHS

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel II.7 sebagai berikut.

Tabel II.7
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAMPD YANG MENDUKUNG ISU KLHS)	TANTANGAN	PELUANG
1	Ekonomi	produksi perikanan:		
		Pengembangan perikanan tangkap	Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap
			Berkurangnya jalur penangkapan WTP	Regulasi Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016
		pengembangan budidaya perikanan	Instabilitas harga ikan budidaya	Pengembangan kawasan nila saline
			Instabilitas harga saprodi ikan budidaya	Perkembangan teknologi budidaya ikan
	Lingkungan, khususnya terkait tutupan lahan hijau	Isu lingkungan hidup :		

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAMPD YANG MENDUKUNG ISU KLHS)	TANTANGAN	PELUANG
		Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Berkurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi	Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir
				Bantuan bibit mangrove dari pemerintah/ swasta
				Bantuan teknis dari LSM Asing

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai dan faktor-faktor eksternal hasil dari analisis yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, serta diidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait dokumen perencanaan pembangunan untuk mendapatkan permasalahan dari faktor – faktor internal untuk mempertajam perumusan isu – isu strategis adalah sebagaimana berikut :

VI.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati merupakan salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang tugas dan fungsinya merupakan pelaksana tugas di bidang kelautan dan perikanan serta pengambil kebijakan dalam pembangunan bidang kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi yang di ambil di sektor perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan dan mutu serta kualitas hasil perikanan baik dalam bentuk ikan segar maupun ikan olahan, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya seperti dirumuskan pada tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah
pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih rendahnya produktivitas tangkap	Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	Jumlah POKMASWAS yang terbentuk belum sebanding dengan daerah rawan pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan
		Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun masih kurang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham	Masih rendahnya jumlah KUB yang dibina
		Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal	Terbatasnya jumlah TPI yang di bangun
			Terbatasnya jumlah TPI yang terpelihara dan terehab
			Belum optimalnya retribusi TPI
			Masih rendahnya prosentase penyelesaian pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan
			Belum optimalnya lokasi normalisasi alur pelayaran TPI
			Masih rendahnya prosentase pengelolaan sarana TPI
			Masih rendahnya prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI
2	Masih rendahnya produktivitas budidaya	Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana
			Belum optimalnya jumlah mangrove yang ditanam
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul belum mencukupi kebutuhan pembudidaya
			Belum optimalnya jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan
			Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan
			Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan
			Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	Kurang optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan
			Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau
			Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar
3	Masih rendahnya produktivitas garam	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Belum optimalnya jumlah kelompok pesisir yang dibina
		Produksi garam belum optimal	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina belum maksimal
4	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya	Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih
		Belum optimalnya produksi olahan ikan	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan
			Belum optimalnya diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan	Masih rendahnya pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan

Dari tabel diatas dapat dilihat seberapa banyak permasalahan yang muncul dari misi yang didukung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati antara lain masalah pokok, masalah dan akar masalah.

Permasalahan yang ada akan didukung dengan data sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Data pendukung terbagi dalam tiga area yaitu data masalah pokok berisi data pembentuk dari indikator kinerja (sasaran), data masalah berisi data pembentuk dari indikator kinerja (program) dan akar masalah yang

merupakan data hasil kegiatan (indikator output) yang sudah dilaksanakan. Data dukung ditampilkan sebagai berikut.

Tabel III.2
Data Dukung Masalah Pokok

No	Masalah Pokok	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
1	Masih rendahnya produktivitas tangkap	Ton/kapal/tahun		53,66
2	Masih rendahnya produktivitas budidaya	Ton/Ha/tahun	32	32
3	Masih rendahnya produktivitas garam	Ton/Ha/musim panen	112,8	120,88
4	Pertumbuhan Angka Konsumsi Ikan yang masih rendah	Kg/kap/th	41,16	42,62

Data pendukung pada table masalah pokok diatas merupakan meta data dari formulasi indikator kinerja sasaran yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan jenis data yang sifatnya sebagai elemen data.

Table III.3
Data Dukung Masalah

No	Masalah	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
1	Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	kasus	13	9
2	Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	unit	3.624	3.636
3	Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham	KUB	17	25
4	Volume ikan yang dilelang di TPI belum optimal	ton	23.517	34.769
5	Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove	Ha	184,74	225,39
6	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	ton	43.608,04	46.140,11
7	Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak	Rp	55.600.000	58.605.000

No	Masalah	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
	dinas			
8	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	orang	30.631	32.335
9	Produksi garam belum optimal	ton	320.228,58	350.761,32
10	Masih rendahnya kelompok pelaku utama perikanan yang sudah mencapai level pelaku utama perikanan madya	kelompok	90	109
11	Belum optimalnya produksi olahan ikan	ton	115.448,4	126.444,6
12	Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan	unit	20	25

Data pendukung pada table masalah diatas merupakan metadata dari formulasi indikator kinerja program yang sudah dirumuskan dalam penghitungan untuk menentukan target, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

Tabel III.4
Data Dukung Akar Masalah

No	Akar Masalah	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
1	Jumlah POKMASWAS yang terbentuk belum sebanding dengan daerah rawan pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	POKMASWAS	1	1
2	Jarak tempuh patroli laut dalam satu tahun masih kurang	Km	1.050	1.440
3	Masih rendahnya jumlah KUB yang dibina	KUB	12	14
4	Terbatasnya jumlah TPI yang di bangun	TPI	1	1
5	Terbatasnya jumlah TPI yang terpelihara dan terehab	TPI	1	2
6	Belum optimalnya retribusi TPI	Milyar Rp	7,17	7,64
7	Masih rendahnya prosentase penyelesaian pembangunan kolam pelabuhan/ tempat	%	-	15,00

No	Akar Masalah	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
	tambat kapal nelayan			
8	Belum optimalnya lokasi normalisasi alur pelayaran TPI	Lokasi	-	1,00
9	Masih rendahnya prosentase pengelolaan sarana TPI	unit	-	1.388,00
10	Masih rendahnya prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI	%	-	14
11	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi mitigasi bencana	Dokumen	1	1
12	Belum optimalnya jumlah mangrove yang ditanam	Batang	15.680	13.000
13	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul belum mencukupi kebutuhan pembudidaya	Ekor	1.600	4.000
14	Belum optimalnya jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	Orang	600	700
15	Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	Orang	200	300
16	Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	Orang	-	500
17	Belum optimalnya jumlah pembudidaya yang terbina dalam pemanfaatan prasarana budidaya	Orang	-	150
18	Kurang optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan	Dokumen	2	1
19	Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau	%	10	10
20	Masih rendahnya prosentase Pembangunan sarana dan prasarana kawasan budidaya air tawar	%	5	10

No	Akar Masalah	Satuan	Data sesuai Keadaan	
			2018	2019
21	Belum optimalnya jumlah kelompok pesisir yang dibina	Kelompok	4	4
22	Jumlah petambak garam yang dilatih dan dibina belum maksimal	Petambak garam	120	120
23	Terbatasnya jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	Penyuluh	50	50
24	Belum optimalnya dokumen perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	Dokumen	2	1
25	Belum optimalnya diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan	Resep	4	5
26	Masih rendahnya pelaku usaha yang memiliki ijin usaha kelautan dan perikanan	Pelaku usaha	-	5

Data pendukung pada table akar masalah diatas merupakan metadata dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan sehingga menjadi dasar dari perhitungan realisasi kinerja dari target yang sudah direncanakan, dimana data tersebut merupakan data yang sifatnya sebagai sub elemen data.

VI.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

Visi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.”

Efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Kelautan dan Perikanan berkorelasi positif terhadap pencapaian Visi Kepala Daerah terpilih khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017-2022 dalam upaya untuk mewujudkan Visinya adalah :

- a. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;

- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
- e. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- f. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- g. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- h. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mendukung dalam pencapaian misi yang ke enam yaitu Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Perikanan termasuk salah satu poin penting yang tidak terlepas dari pertanian. Peningkatan produktivitas komoditas perikanan diharapkan mampu untuk menaikkan daya saing daerah dan ikut berperan aktif dalam menumbuhkan perekonomian di Kabupaten Pati. Dalam hal mendukung pencapaian misi Kepala Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 2 (dua) program unggulan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap dan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dipaparkan pada Tabel III.1. di atas, dan dikaitkan dengan telaah visi dan misi Bupati terpilih selanjutnya diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor pendukung dan penghambat tersebut:

Tabel III.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pati

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Misi ke 6 Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	Rendahnya SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan	Adanya Insentif pemerintah dalam peningkatan SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan
		Kualitas produksi garam masih belum optimal	Rendahnya SDM dan aplikasi teknologi usaha garam	Penyediaan insentif pemerintah dan Regulasi Niaga Garam
		Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	Rendahnya pengetahuan terhadap konservasi sumber daya kelautan	Peningkatan peran penegakkan terhadap pelanggaran sumber daya kelautan
		Kurangnya kesadaran nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan	Tingkat pengetahuan dan SDM Pelaku penangkapan yang masih rendah	Peningkatan peran pengawasan dalam penggunaan alat tangkap
		Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove	Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir	Bantuan benih bakau dari pemerintah atau swasta
		Belum optimalnya produksi perikanan budidaya	Rendahnya SDM pelaku usaha budidaya dan kualitas sarana produksi budidaya	Adanya Insentif dari Pemerintah tentang penyediaan sarana produksi budidaya
		Masih banyak KUB nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham	Keterbatasan biaya untuk pengurusan KUB berbadan hukum	Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku KUB
		Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai	<div> <div>- Rendahnya kesadaran pelaku usaha (bakul dan pemilik kapal) untuk melelangkan ikan di TPI</div> <div>- Harga lelang ikan belum stabil</div> </div>	Optimalisasi penerapan regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana TPI

No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	Keterbatasan SDM pelaku perbenihan dan budidaya	Kesiapan alih teknis perbenihan dan budidaya
		Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula	Keterbatasan penegak hukum dan akses permodalan bagi pelaku usaha	Keterbukaan akses informasi dan dukungan pemerintah terhadap kelompok pelaku usaha perikanan
		Belum optimalnya produksi olahan ikan	Rendahnya aplikasi teknologi pengolahan ikan	Diversifikasi teknologi pengolahan ikan
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan	Sulitnya akses penjualan bagi pelaku usaha ikan dan perikanan	Dukungan kemudahan akses penjualan melalui usaha ikan dan perikanan

VI.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

A. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 akan menitik beratkan pada arahan Presiden kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yakni untuk memperbaiki dan membangun komunikasi dengan nelayan dalam arti luas, dan mengoptimalkan perikanan budidaya yang memiliki potensi besar namun belum dimanfaatkan.

Hal ini semua akan dilaksanakan dengan menjabarkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai

Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 akan menjabarkan agenda pembangunan nasional dan arahan-arahan Presiden tersebut ke dalam program-program pembangunan

antara lain untuk kesejahteraan masyarakat, penyerapan lapangan pekerjaan, dan peningkatan devisa negara.

VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

TUJUAN

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan, yakni:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan;
 - b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional, yakni:
 - a. Optimalnya pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yaitu optimalnya konservasi dan keanekaragaman hayati.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP, dengan tujuan Meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- SS-1 Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
- SS-2 Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
- SS-3 Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
- SS-4 Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat

- SS-5 Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan
- SS-6 Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
- SS-7 Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing
- SS-8 Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif
- SS-9 Tatakelola pemerintahan yang baik.

Dalam penyusunan Peta Strategi, KKP menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders prespective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Stakeholders Perspective

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat”, dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP) dari 59,16 pada tahun 2020 menjadi 63,87 pada tahun 2024;

Customer Perspective

Sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 2) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7,9% pada tahun 2020 menjadi 8,71% pada tahun 2024;
- 3) Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 8,00 miliar pada tahun 2024;
- 4) Konsumsi ikan, dari 56,39 kg/kapita/thn pada tahun 2020 menjadi 62,05 kg/kapita/thn pada tahun 2024;

Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan”, dengan indikator kinerja:

- 5) Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman dari $\leq 64\%$ pada tahun 2020 mejadi $\leq 80\%$ pada tahun 2024;
- 6) Luas kawasan konservasi perairan, dari 23,40 juta ha pada tahun 2020 menjadi 26,90 juta ha pada tahun 2024;

Internal Process Perspective

Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat”, dengan indikator kinerja:

- 7) Lulusan pendidikan dan pelatihan yang terserap dunia usaha dan dunia industri / DUDI, dari 17.175 orang pada tahun 2020 menjadi 19.546 orang pada tahun 2024;
- 8) Kelompok pelaku utama/usaha yang ditingkatkan kelasnya, setiap tahun minimal sebanyak 1.500 kelompok selama tahun 2020-2024;

Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah “Hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan”, dengan indikator kinerja:

- 9) Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan, dari 5 hasil riset pada tahun 2020 menjadi 15 hasil riset pada tahun 2024;

Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”, dengan Indikator Kinerja:

- 10) WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola, dari 3 WPP pada tahun 2020 menjadi 11 WPP pada tahun 2024;
- 11) Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir, dari 24 Rencana Zonasi pada tahun 2020 menjadi 102 Rencana Zonasi pada tahun 2024;
- 12) Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, dari 94% pada tahun 2020 menjadi 98% npada tahun 2024;

Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja:

- 13) Produksi perikanan, dari 26,46 juta ton pada tahun 2020 menjadi 32.75 juta ton pada tahun 2024;
- 14) Produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024;

- 15) Dana yang disalurkan untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil, dari Rp2,8 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,2 triliun pada tahun 2024;
- 16) Kawasan kluster sentra produksi perikanan budidaya unggulan, dari 5 kawasan pada tahun 2020 menjadi 50 kawasan pada tahun 2024;

Saran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif”, dengan Indikator Kinerja:

- 17) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing, dari 54,18% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024;
- 18) Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan 93% dari tahun 2020 hingga 2024;
- 19) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan dari 77% pada tahun 2020 menjadi 82% pada tahun 2024;
- 20) Persentase penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan, dengan target 93% dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;

Learning and Growth Perspective (input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP melalui Sasaran strategis kesembilan (SS-9) “Tatakelola pemerintahan yang baik” dengan indikator kinerja:

- 21) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari 80 pada tahun 2020 menjadi 84 pada tahun 2024;
- 22) Indeks Profesionalisme ASN dari 72 pada tahun 2020 menjadi 76 pada tahun 2024;
- 23) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,6 pada tahun 2020 menjadi 4,2 pada tahun 2024;
- 24) Indikator level maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) 3 dari tahun 2020 hingga 2024;
- 25) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KKP dari 88 pada tahun 2020 menjadi 90 pada tahun 2024;

- 26) Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2020 hingga 2024;
- 27) Indikator Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KKP, dari A (82) pada tahun 2020 menjadi AA (90) pada tahun 2024.

B. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan : “Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan” dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).
2. Berkaitan dengan kesekretariatan : “Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran :

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran: produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
2. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran: Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran: Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Dari telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dijabarkan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati seperti tertuang dalam tabel III.6 berikut ini:

Tabel III.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Ditinjau Dari Sasaran
Jangka Menengah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
Serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Sasaran Strategis Renstra Kementerian dan Dinas Provinsi	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Peningkatan konsumsi makan ikan (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya konsumsi ikan	Keterbatasan SDM Aparatur dalam mempromosikan GEMARIKAN	Banyaknya pameran dan festival pangan lokal yang diadakan pemerintah kabupaten
2	Peningkatan produksi ikan (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya produksi ikan	Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung	Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan
			Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir	Tingginya permintaan ikan dan benih
			Kurang optimalnya pengawasan Sumber Daya Ikan	Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai)
3	Peningkatan produksi garam (Kementrian dan Propinsi)	Masih rendahnya produksi garam	Kurangnya penerapan teknologi pergaraman	Tingginya permintaan garam untuk industri

VI.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan setiap kabupaten/kota untuk menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang

Kabupaten Pati telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pati Tahun 2010-2030

RTRW Kabupaten Pati memuat tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang, arahan pemanfaatan ruang, ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, serta ketentuan umum peraturan zonasi. Kebijakan pemanfaatan ruang meliputi arahan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Sebagai landasan operasional dalam pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya proses perizinan diperlukan rencana tata ruang yang bersifat lebih rinci / detail terutama pada kawasan perkotaan dan strategis, serta kawasan yang diarahkan menjadi kawasan perkotaan, yaitu dalam bentuk rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Ada 9 kecamatan atau kawasan perkotaan di Kabupaten Pati yang telah disusun RDTR-nya. Namun beberapa diantaranya masih memerlukan revisi dan dilengkapi dengan peraturan zonasi. Selain rencana rinci tata ruang, diperlukan aturan turunan lainnya dari RTRW Kabupaten Pati berupa Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sesuai amanat Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengacu pada tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dikaitkan dengan dokumen Ex-Ante RTRW maka telaah terhadap keselarasan RTRW tidak dilakukan.

2. Telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu pada isu daerah di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, pengembangan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kelestarian lingkungan (*green economy*). Upaya untuk mewujudkan itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pembangunan bidang kelautan dan perikanan yang dilandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sehingga dalam

prakteknya ke depan, setiap aktivitas ekonomi oleh masyarakat dalam skala usaha apapun (besar, menengah, kecil maupun mikro atau rumah tangga) harus senantiasa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam kaitannya dengan KLHS program dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati yang langsung bersinggungan dengan lingkungan yaitu Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel III.7 sebagai berikut.

Tabel III.7
Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

NO	ISU KLHS	PROGRAM PD (PROGRAMPD YANG MENDUKUNG ISU KLHS)	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Ekonomi	produksi perikanan:		
		Pengembangan perikanan tangkap	Masih terdapat oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Pembangunan prasarana tangkap secara bertahap oleh pemerintah kabupaten melalui dinas
		pengembangan budidaya perikanan	Masih sedikit pembudidaya yang mandiri dalam pembuatan pakan ikan	Tersedianya aparatur dalam pembinaan
2	Lingkungan, khususnya terkait tutupan lahan hijau	Isu lingkungan hidup :		
		Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Lemahnya penindakan hukum terhadap perusakan mangrove	Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan

VI.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

Isu strategis merupakan permasalahan berisi gabungan masalah-masalah yang membawa kerugian dalam jangka waktu yang lama. Penentuan isu-isu strategis tidak lepas dari adanya hasil analisis dan telaah pada visi dan misi, renstra OPD yang terkait dengan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati dan KLHS, hasil analisis dan telaah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No	Permasalahan	Tantangan	Hambatan
	Masih rendahnya konsumsi ikan	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya manfaat mengkonsumsi ikan	Keterbatasan SDM Aparatur dalam mempromosikan GEMARIKAN
		Kurangnya nilai tambah produk	

No	Permasalahan	Tantangan	Hambatan
		pengolahan ikan	
	Masih rendahnya produksi ikan	Degradasi lingkungan (mangrove, terumbu karang) dan penurunan mutu perairan	Terbatasnya infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung
		Keterbatasan sarana prasarana penangkapan dan budidaya ikan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem pesisir
		Tingginya harga pakan ikan	Kurang optimalnya pengawasan Sumber Daya Ikan
	Masih rendahnya produksi garam	Rendahnya harga garam rakyat dibanding garam industri	Kurangnya penerapan teknologi pergaraman
	Pengembangan perikanan tangkap	Penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Masih terdapat oknum nelayan yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan
		Berkurangnya jalur penangkapan WTP	
	pengembangan budidaya perikanan	Instabilitas harga ikan budidaya	Masih sedikit pembudidaya yang mandiri dalam pembuatan pakan ikan
		Instabilitas harga saprodi ikan budidaya	
	Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Berkurangnya luasan eksisting mangrove pada kawasan rawan abrasi	Lemahnya penindakan hukum terhadap kerusakan mangrove
	Masih rendahnya pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan		Rendahnya kualitas SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan
	Kualitas produksi garam masih belum optimal		Rendahnya SDM dan aplikasi teknologi usaha garam
	Masih banyaknya kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan		Rendahnya pengetahuan terhadap konservasi sumber daya kelautan
	Kurangnya kesadara nelayan dalam menggunakan alat tangkap ramah lingkungan		Tingkat pengetahuan dan SDM Pelaku penangkapan yang masih rendah
	Masih terbatasnya luasan eksisting lahan mangrove		Terjadinya kerusakan ekosistem mangrove dan tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir
	Belum optimalnya produksi perikanan budidaya		Rendahnya SDM pelaku usaha budidaya dan kualitas sarana produksi budidaya
	Masih banyak KUB		Keterbatasan biaya untuk

No	Permasalahan	Tantangan	Hambatan
	nelayan yang belum berbadan hukum khususnya berbadan hukum Kemenkumham		pengurusan KUB berbadan hukum
	Pelayanan jasa pelelangan di TPI untuk mengoptimalkan volume ikan yang dilelang masih belum memadai		Rendahnya kesadaran pelaku usaha (bakul dan pemilik kapal) untuk melelangkan ikan di TPI
			Harga lelang ikan belum stabil
	Belum optimalnya retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas		Keterbatasan SDM pelaku perbenihan dan budidaya
	Sebagian kelas kelompok pelaku utama perikanan merupakan kelas kelompok pemula		Keterbatasan penegak hukum dan akses permodalan bagi pelaku usaha
	Belum optimalnya produksi olahan ikan		Rendahnya aplikasi teknologi pengolahan ikan
	Kurangnya kesadaran pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mengajukan ijin usaha kelautan dan perikanan		Sulitnya akses penjualan bagi pelaku usaha ikan dan perikanan

Dari hasil analisis dan telaah pelayanan perangkat daerah terkait permasalahan yang ada jika diselaraskan dengan sub isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pati 2017 – 2022 maka sub isu tersebut sebagai berikut :

1. Pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran (isu ke 2 sub isu 1);
2. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan (isu ke 4 sub isu ke 3).

Dari hasil penyelarasan/telaah berbagai permasalahan, tantangan, peluang serta hambatan dan kekuatan sebagaimana tersebut dalam pembahasan sebelumnya maka diperoleh isu-isu strategis dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sebagai berikut :

1. Peningkatan produktifitas perikanan tangkap, budidaya dan garam
2. Peningkatan angka konsumsi makan ikan
3. Peningkatan nilai tambah produk pengolahan ikan
4. Peningkatan kualitas SDM Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
5. Penerapan teknologi usaha Kelautan dan Perikanan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

VII.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah “Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan” dengan indikator kinerja pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan yang merupakan pertumbuhan rata-rata dari komoditas unggulan Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu produktivitas tangkap, produktivitas budidaya dan produktivitas garam.

Sedangkan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah:

1. Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai 3 indikator kinerja yaitu *Produktivitas tangkap* didapatkan dengan cara membandingkan hasil tangkapan ikan yang dilelang di Tempat Pelelangan Ikan dengan jumlah armada kapal yang menambatkan kapalnya di TPI, *produktivitas budidaya* diukur dengan cara membagi jumlah produksi budidaya total dengan luasan lahan budidaya ikan (tambak, kolam, sawah/ mina padi), dan *produktivitas garam rakyat* dihitung dengan membagi produksi garam rakyat selama musim produksi garam dengan luas lahan tambak garam.

2. Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk.

Sasaran jangka menengah ini mempunyai indikator kinerja pertumbuhan angka konsumsi ikan. Angka konsumsi ikan adalah suatu angka yang menunjukkan tingkat konsumsi ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat per kapita penduduk selama satu tahun. Untuk perhitungannya angka konsumsi ikan ini dihitung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bersumber dari data SUSENAS.

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta target capaian kinerja selama 5 (lima) tahun dijabarkan dalam tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan		Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	2.53	3.31	3.49	4.08	5.43
		Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	Produktivitas perikanan tangkap	13.16	13.21	13.27	13.39	13.53
			Produktivitas perikanan budidaya	3.9	3.9	3.91	3.92	3.93
			Produktivitas garam rakyat	74.54	81.5	89.45	99.39	114.3
		Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	4.45%	3.51%	3.49%	3.47%	3.71%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten pati, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD. Pernyataan visi, misi RPJMD diterjemahkan ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan organisasi perangkat daerah.

Berdasarkan peluang dan pendorong yang didapatkan dari analisa pada Bab II dan telaah pada Bab III terhadap permasalahan yang ada guna menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah, berikut ditampilkan table peluang dan pendorong :

Tabel V.1

Peluang dan Pendorong Penentuan Strategi dan Arah Kebijakan

No	Peluang	Pendorong
	Promosi GEMARIKAN	Adanya Insentif pemerintah dalam peningkatan SDM dan penerapan teknologi usaha kelautan dan perikanan
	Berkembangnya industri perikanan	Penyediaan insentif pemerintah dan Regulasi Niaga Garam
	Dukungan permodalan dalam bentuk kredit lunak dan pola kemitraan	Peningkatan peran penegakkan terhadap pelanggaran sumber daya kelautan
	Berkembangnya Gerakan Cinta Lingkungan	Peningkatan peran pengawasan dalam penggunaan alat tangkap
	Berkembangnya teknologi pergaraman	Bantuan benih bakau dari pemerintah atau swasta
	Pembangunan gudang garam dan koperasi garam	Adanya Insentif dari Pemerintah tentang penyediaan sarana produksi budidaya
	Insentif kepada pelaku usaha perikanan tangkap	Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku KUB
	Regulasi Permen KP Nomor 71/PERMEN-KP/2016	Optimalisasi penerapan regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana TPI
	Pengembangan kawasan nila saline	Kesiapan alih teknisi perbenihan dan budidaya
	Perkembangan teknologi budidaya ikan	Keterbukaan akses informasi dan dukungan pemerintah terhadap kelompok pelaku usaha perikanan
	Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan dan konservasi wilayah pesisir	Diversifikasi teknologi pengolahan ikan

No	Peluang	Pendorong
	Bantuan bibit mangrove dari pemerintah/ swasta	Dukungan kemudahan akses penjualan melalui usaha ikan dan perikanan
	Bantuan teknis dari LSM Asing	Banyaknya pameran dan festival pangan lokal yang diadakan pemerintah kabupaten
		Tersedianya SDM aparatur dalam pembinaan pelaku usaha perikanan
		Tingginya permintaan ikan dan benih
		Tersedia potensi pengembangan perikanan (lahan, air, panjang pantai)
		Tingginya permintaan garam untuk industri
		Pembangunan prasarana tangkap secara bertahap oleh pemerintah kabupaten melalui dinas
		Tersedianya aparatur dalam pembinaan
		Pembentukan kelompok masyarakat pengawas perikanan

Dari peluang dan pendorong yang ada dengan mempedomani alur perencanaan yang telah disusun dalam Cascading perencanaan lima tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati akan dapat ditentukan strategi dan arah kebijakan dari penjabaran tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dirumuskan sebagaimana tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
Misi ke 6		:	Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri				
Meningkatnya daya saing daerah bidang kelautan dan perikanan	1	Meningkatnya produktivitas di sektor kelautan dan perikanan	1	Peningkatan perekonomian masyarakat pesisir	1	Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pesisir	
			2	Peningkatan produksi garam rakyat	2	Terlaksananya pembinaan dan pelatihan petambak garam	
			3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	3	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
			4	Meningkatnya Kesadaran Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya laut	4	Terciptanya lingkungan kondusif di perairan laut	
			5	Peningkatan pelestarian tanah gisik di kawasan pesisir	5	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi Mitigasi Bencana Alam Laut	
					6	Terlaksananya peringatan hari nusantara dan penanaman mangrove	
			6	Peningkatan produksi perikanan budidaya	7	Tercukupinya ketersediaan bibit ikan unggul	
					8	Terlaksananya pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	
					9	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan budidaya perikanan	
					10	Tercukupinya pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan pada pembudidaya ikan	
					11	Terlaksananya pembinaan pemanfaat prasarana budidaya dan terkelolanya prasarana UPTD BBBI	
			7	Peningkatan produksi perikanan tangkap	12	Terfasilitasinya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	
					13	Tersedianya TPI yang representatif	
					14	Terbangunnya kolam pelabuhan untuk tempat tambat kapal	
					15	Meningkatnya kelancaran lalu lintas kapal menuju TPI	
					16	Tersedianya tempat tambat kapal	

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
						17	Tersedianya sarana pendukung operasional TPI
			8	Peningkatan retribusi penjualan produksi usaha daerah (BBI dan Tambak Dinas)		18	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kawasan budidaya perikanan
						19	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya laut dan air payau
						20	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana kawasan budidaya air tawar
	2.	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk	9	Meningkatnya Pengetahuan penyuluh perikanan		21	Terbinanya penyuluh perikanan
			10	Peningkatan produksi olahan ikan yang bermutu		22	Terlaksananya kajian dalam usaha mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan
						23	Meningkatnya ketrampilan pengolah dan pemasar dalam mengoptimalkan nilai tambah hasil perikanan
						24	Terlaksananya fasilitasi pengajuan ijin usaha kelautan dan perikanan

Hasil perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang disertai target kinerja akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dengan disertai penganggaran, akan dipedomani Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam penyusnan perencanaan tahunan/ renja perangkat daerah karena hal tersebut merupakan bentuk konsistensi dokumen perencaan pembangunan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Arah kebijakan dan strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tahun 2017-2022 yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan sebagaimana tabel VI.1 sebagai berikut:

Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pati

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
						2018		2019		2020		2021		2022		periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	42,036 ton	42,290 ton	731.500.000	42,400 ton	2.500.000.000	42,515 ton	2.773.124.000	42,640 ton	3.039.447.000	42,775 ton	3.370.068.000	42,775 ton	12.414.139.000		
				udang Windu	1,025 ton	755		760		770		775		780		780			
				bandeng	28,360 ton	28.040		28.050		28.060		28.080		28.100		28,1			
				nila salin	486 ton	550		600		650		665		710		710			
				lele	10,272 ton	11.510		11.530		11.550		11.600		11.650		11,65			
				ikan lain	1,893 ton	1.435		1.460		1.485		1.520		1.535		1,535			
		3.01.01.20.001	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah ketersediaan induk/ calon induk ikan unggul	1,200 ekor	1,600 ekor	520.000.000	4,000 ekor	700.000.000	4,000 ekor	775.000.000	110.023 ekor	850.000.000	110.100 ekor	930.068.000	220.123 ekor	3.775.068.000		5 BBBI
		3.01.01.20.002	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	Jumlah Pembudidaya yang mendapatkan pendampingan	3000 Pembudidaya	600 Pembudidaya	107.500.000	700 Pembudidaya	650.000.000	700 Pembudidaya	560.000.000	600 pembudidaya	590.000.000	400 pembudidaya	675.000.000	3.000 Pembudidaya	2.582.500.000		Kab. Pati
		3.01.01.20.003	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah pembudidaya yang terbina dalam pengembangan budidaya perikanan	-	150 pembudidaya	104.000.000	600 pembudidaya	700.000.000	250 pembudidaya	780.124.000	300 pembudidaya	789.447.000	200 pembudidaya	830.000.000	1500 pembudidaya	3.203.571.000		Kab. Pati
		3.01.01.20.004	Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit ikan	Jumlah pembudidaya yang terlayani masalah kesehatan ikan dan lingkungan	-	-	-	1,000 Pembudidaya	300.000.000	350 Pembudidaya	500.000.000	340 Pembudidaya	650.000.000	335 Pembudidaya	770.000.000	2.025 Pembudidaya	2.220.000.000		Kab. Pati
		3.01.01.20.005	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya	Pembinaan pemanfaatan prasarana budidaya	-	-	-	500 Pembudidaya	150.000.000	0 Pembudidaya	-	60 Pembudidaya	160.000.000	44 Pembudidaya	165.000.000	604 Pembudidaya	475.000.000		Kab. Pati
		3.01.01.20.005	Pembinaan Pengelolaan Prasarana Budidaya	Pembinaan pemanfaatan prasarana budidaya	-	-	-	-	-	76 Pembudidaya	158.000.000	-	-	-	-	76 pembudidaya	158.000.000		Kab. Pati
		3.01.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	175,00%	23,08%	3.996.500.000	25,00%	14.300.000.000	25%	20.000.000.000	28,00%	21.920.742.000	28,13%	23.436.853.000	28,13%	83.654.095.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Volume ikan yang dilelang di TPI	27,78 2 ton	28,00 4.67 ton		28,22 8.71 ton		28,511.00 ton		28,853.13 ton		29,22 8.22 ton		29,22 8.22 ton			
		3.01.01.21.001	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah KUB yang dibina	12 KUB	12 KUB	255.000.000	14 KUB	370.800.000	15 KUB	400.000.000	17 KUB	450.000.000	20 KUB	710.000.000	78 KUB	2.185.800.000		7 kec. Pesisir
				Jumlah nelayan yang terbina								6.474 orang		6.500 orang		12.974 orang			
				jumlah paket pencairan dana kesejahteraan nelayan dan jaminan sosial keselamatan bagi nelayan (asuransi)								5.856 paket bantuan		5.860 paket bantuan		11.716 orang			
		3.01.01.21.002	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang di bangun	1 TPI	1 TPI	185.945.000	0	-	1 TPI	1.250.000.000	1 TPI	1.150.000.000	-	-	3 TPI	2.585.945.000		8 TPI
		3.01.01.21.003	Pemeliharaan rutin/ berkala Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah TPI yang terpelihara dan terehab	8 TPI	1 TPI	355.555.000	2 TPI	1.129.200.000	2 TPI		1 TPI	970.742.000	2 TPI	1.476.853.000	8 TPI	5.232.350.000		8 TPI
		3.01.01.21.004	Rehabilitasi Sedang/Berat Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah rehab sedang/ berat TPI	1 TPI	1 TPI	200.000.000	NIHIL								1 TPI	200.000.000		8 TPI
		3.01.01.21.005	Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap	Jumlah retribusi TPI	Rp. 6 Milyar	Rp. 6.7 Milyar	3.000.000.000	Rp. 6.7 Milyar	3.200.000.000	Rp. 6.8 Milyar	3.400.000.000	Rp. 6.9 Milyar	3.600.000.000	Rp. 7 Milyar	3.800.000.000	Rp. 34,1 Milyar	17.000.000.000		8 TPI
		3.01.01.21.006	Pembangunan Kolam Pelabuhan/ Tempat Tambat Kapal Nelayan	Prosentase pembangunan kolam pelabuhan/ tempat tambat kapal nelayan	0%	0%	-	15%	9.000.000.000	20%	12.800.000.000	30%	14.900.000.000	35%	17.000.000.000	100%	53.700.000.000		7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.007	Normalisasi Alur Pelayaran TPI	Jumlah lokasi normalisasi alur pelayaran TPI	0	0	-	2 lokasi	200.000.000	2 lokasi	400.000.000	2 lokasi	250.000.000	2 lokasi	200.000.000	8 lokasi	1.050.000.000		7 Kec. Pesisir
		3.01.01.21.008	Pengelolaan Sarana TPI	Prosentase pengelolaan sarana TPI	0%	0%	-	10%	400.000.000	10%	200.000.000	20%	350.000.000	20%	250.000.000	60%	1.200.000.000		8 TPI

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						2018	2019	2020	2021	2022	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.21.009	Pembangunan Turap Dermaga	Prosentase pembangunan Turap Dermaga di lingkungan TPI	0%	0%	-	0%	-	15%	250.000.000	15%	250.000.000	0%	-	30%	500.000.000		8 TPI
		3.01.01.24	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	63,73 %	100%	225.000.000	100%	2.400.000.000	100%	2.662.199.000	100%	2.917.869.000	100%	3.235.265.000	100%	11.440.333.000		
		3.01.01.24.001	Kajian Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar	Jumlah informasi budidaya perikanan	1 dokumen	2 dokumen	225.000.000	2 dokumen	250.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	260.000.000	7 dokumen	1.035.000.000		Kab. Pati
		3.01.01.24.016	Pengembangan Kawasan Budidaya Laut dan Air Payau	Pembangunan prasarana kawasan budidaya laut dan air payau	-	-	-	2 tambak dinas	950.000.000	2 tambak dinas	1.012.199.000	2 tambak dinas	1.067.869.000	2 tambak dinas	1.475.265.000	8 tambak dinas	4.505.333.000		Kab. Pati
		3.01.01.24.017	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	Pembangunan prasarana kawasan budidaya air tawar	-	-	-	3 BBI	1.200.000.000	3 BBI	1.500.000.000	3 BBI	1.700.000.000	3 BBI	1.500.000.000	12 BBI	5.900.000.000		Kab. Pati
	Meningkatnya konsumsi ikan perkapita penduduk			Pertumbuhan angka konsumsi ikan	3,16%	4,45%		3,51%		3,49%		3,47%		3,71%		3,71%			
		3.01.01.22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	4,82%	5,52%	50.000.000	6,19%	300.000.000	6,40%	332.775.000	6,67%	364.734.000	7,18%	404.409.000	7,18%	1.451.918.000		
		3.01.01.22.001	Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan	Jumlah penyuluh perikanan yang terbina dan terlatih	50 Penyuluh	50 Penyuluh	50.000.000	55 Penyuluh	300.000.000	45 Penyuluh	332.775.000	50 Penyuluh	364.734.000	50 Penyuluh	404.409.000	250 Penyuluh	1.451.918.000		Kab. Pati
		3.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Produksi olahan ikan	41,46 5.55 ton	41,88 1.24 ton	97.000.000	42,09 0.64 ton	2.350.000.000	42,301.10 ton	2.523.124.000	42,512.60 ton	2.714.447.000	42,72 5.17 ton	2.995.068.000	42,72 5.17 ton	10.679.639.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	0,00%	6,80%		7,20%		7,50%		8,30%		8,70%		8,70%			
		3.01.01.23.001	Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Jumlah daerah yang dipetakan dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan dan pemasaran produksi kelautan dan perikanan	21 kecamatan	21 kecamatan	20.000.000	21 kecamatan	650.000.000	21 kecamatan	700.000.000	21 kecamatan	750.000.000	21 kecamatan	780.000.000	105 kecamatan	2.900.000.000		Kab. Pati
		3.01.01.23.026	Pengembangan Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah diversifikasi produk olahan ikan yang dipraktekkan	3 resep	4 resep	77.000.000	5 resep	1.550.000.000	5 resep	1.623.124.000	3 resep	1.664.447.000	3 resep	1.815.068.000	20 resep	6.729.639.000		Kab. Pati
		3.01.01.23.027	Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	Jumlah pemohon ijin usaha skala mikro	-	-	-	8 pelaku usaha	150.000.000	50 pelaku usaha	200.000.000	80 pelaku usaha	300.000.000	90 pelaku usaha	400.000.000	228 pelaku usaha	1.050.000.000		Kab. Pati
Non Urusan																			
		3.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	1.365.495.000	100,00%	1.707.661.000	100,00%	1.894.222.000	100,00%	2.076.138.000	100,00%	2.301.973.000	100,00%	9.345.489.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	300 surat	1000 surat	4.800.000	1050 surat	6.000.000	1100 surat	7.500.000	1535 surat	9.000.000	1500 surat	11.000.000	6185 surat	38.300.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah arsip dinamis	jenis							1 jenis		1 jenis		2 jenis			
		3.01.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Pembayaran Pajak	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	14 rekening	14 rekening	122.000.000	14 rekening	130.700.000	14 rekening	143.580.000	14 rekening	152.259.000	14 rekening	171.872.000	70 rekening	720.411.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah layanan teknis berbasis e-gov	paket							1 paket		1 paket		2 paket			
		3.01.01.01.004	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	Jumlah jasa layanan umum	12 bulan	12 bulan	9.792.000	12 bulan	11.220.000	12 bulan	12.960.000	12 bulan	14.820.000	60 bulan	16.800.000	20 polis asuransi kesehatan	65.592.000		DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.006	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	64 surat ijin kendaraan dinas	64 surat ijin kendaraan dinas	20.900.000	65 surat ijin kendaraan dinas	25.850.000	67 surat ijin kendaraan dinas	29.640.000	68 surat ijin kendaraan dinas	33.700.000	68 surat ijin kendaraan dinas	40.200.000	332 surat ijin kendaraan dinas	150.290.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa layanan umum		3 paket	52.400.000	3 paket	65.000.000	3 paket	73.500.000	3 paket	75.200.000	3 paket	77.980.000	15 paket	344.080.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa layanan umum	69 unit	89 unit	32.499.000	92 unit	45.880.000	94 unit	50.450.000	96 unit	57.458.000	98 unit	74.778.000	469 unit	261.065.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	2,402 unit	2,568 unit	17.658.000	2,623 unit	27.500.000	2,654 unit	31.192.000	2,685 unit	39.600.000	2,712 unit	46.500.000	13.242 unit	162.450.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.011	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiildan	41,491 Lembar	41,528 lembar	16.559.000	41,620 lembar	22.240.000	41,640 lembar	26.600.000	41,660 lembar	33.000.000	41,680 lembar	40.260.000	208.128 lembar	138.659.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	158 unit	110 unit	7.783.000	115 unit	9.600.000	120 unit	12.250.000	125 unit	16.200.000	130 unit	19.760.000	600 unit	65.593.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	-	31 buah	87.804.000	10 buah	112.447.000	14 buah	144.290.000	17 buah	152.800.000	20 buah	168.483.000	92 buah	665.824.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	54 eksemplar	88 eksemplar	9.544.000	90 eksemplar	12.600.000	92 eksemplar	14.500.000	94 eksemplar	17.600.000	96 eksemplar	23.100.000	460 eksemplar	77.344.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.016	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	-	24,480 unit	206.640.000	46,080 unit	392.680.000	46,680 unit	420.120.000	47,280 unit	490.800.000	47,280 unit	502.440.000	211.800 unit	2.012.680.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah bahan logistik kantor	3,427 Porsi	5,025 Porsi	84.830.000	5,035 Porsi	90.340.000	5,045 Porsi	97.500.000	5,050 Porsi	101.900.000	5,060 Porsi	109.660.000	25.215 Porsi	484.230.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	1,843 laporan perjalanan/notulen rapat	2,041 laporan perjalanan/notulen rapat	300.010.000	2,048 laporan perjalanan/notulen rapat	317.454.000	2,054 laporan perjalanan/notulen rapat	334.500.000	210 laporan perjalanan/notulen rapat	338.301.000	220 laporan perjalanan/notulen rapat	376.870.000	10.278 laporan perjalanan/notulen rapat	1.667.135.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah kunjungan tamu	unit							700 orang		750 orang		1.450 orang			
		3.01.01.01.019	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis / Keamanan	Jumlah jasa layanan umum	20 orang	16 orang	244.800.000	17 orang	275.400.000	18 orang	311.040.000	19 orang	342.000.000	20 orang	396.000.000	90 orang	1.569.240.000		DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.01.020	Penyediaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	43 berkas administrasi paket pekerjaan	45 berkas administrasi paket pekerjaan	60.000.000	48 berkas administrasi paket pekerjaan	70.500.000	30 berkas administrasi paket pekerjaan	82.000.000	30 berkas administrasi paket pekerjaan	93.000.000	35 berkas administrasi paket pekerjaan	110.400.000	188 berkas administrasi paket pekerjaan	415.900.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.01.022	Penyediaan Pendukung Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Barang	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan PD	10 orang/bulan (12 bulan)	132 orang/th	87.476.000	132 orang/th	92.250.000	132 orang/th	102.600.000	120 orang/th	108.500.000	120 orang/th	115.870.000	636 orang/th	506.696.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	-	-		-		-		14 dokumen		14 dokumen		24 dokumen			
		3.01.01.02	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	415.735.000	100%	532.918.000	100%	580.206.000	100%	625.182.000	100%	689.708.000	100%	2.843.749.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.005	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	1 unit	20.000.000	2 unit	40.000.000	1 unit	25.000.000	-	-	2 unit	60.000.000	6 unit	145.000.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	3 unit	180.700.000	2 unit	204.100.000	3 unit	211.800.000	3 unit	240.200.000	4 unit	250.000.000	15 unit	1.086.800.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah sarana atau prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	-	3 unit	19.745.000	5 unit	40.000.000		-	2 unit	25.000.000		-	10 unit	84.745.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebel	-	19 unit	43.545.000	5 unit	59.418.000	7 unit	86.906.000	8 unit	98.732.000	9 unit	105.300.000	48 unit	393.901.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	1 unit	1 unit	61.745.000	1 unit	65.900.000	1 unit	99.500.000	1 unit	100.750.000	1 unit	103.000.000	5 unit	430.895.000		DKP Kab. Pati

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Ketertiban pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	97.285.000	100	125.752.000	100	150.424.000	100	175.615.000	100	198.197.000	100	747.273.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	5 laporan	21.000.000	5 laporan	23.000.000	5 laporan	23.000.000	5 laporan	30.000.000	5 laporan	28.000.000	30 laporan	125.000.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah data kinerja yang terisi	-	-		-		-		55 jenis data	-	55 jenis data		24 bulan			
		3.01.01.06.004	Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	1 laporan	13.000.000	1 laporan	14.000.000	1 laporan	14.000.000	1 laporan	20.000.000	1 laporan	15.000.000	5 laporan	76.000.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.005	Penyusunan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	3 dokumen	2 dokumen	21.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	25.000.000	2 dokumen	35.000.000	2 dokumen	35.000.000	10 dokumen	141.000.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.006	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	4 dokumen	4 dokumen	21.000.000	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	25.000.000	1 dokumen	35.000.000	1 dokumen	35.000.000	14 dokumen	141.000.000		DKP Kab. Pati
				Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD								1 dokumen		1 dokumen		2 dokumen			
		3.01.01.06.007	Penyusunan Laporan Perkembangan Kegiatan PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	12 laporan	21.285.000	12 laporan	23.752.000	12 laporan	23.424.000	12 laporan	30.615.000	12 laporan	30.197.000	60 laporan	129.273.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.009	Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja PD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	-	-	1 laporan	15.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	25.000.000	1 laporan	20.000.000	4 laporan	75.000.000		DKP Kab. Pati
		3.01.01.06.010	Penyusunan Rencana Strategis PD (Renstra PD)	Jumlah dokumen perencanaan PD	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	25.000.000	-	-	1 dokumen	35.000.000	2 dokumen	60.000.000		DKP Kab. Pati

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2017	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1 2018		Tahun-2 2019		Tahun-3 2020		Tahun-4 2021		Tahun-5 2022		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TOTAL							7.330.515.000		25.350.178.000		32.257.405.000		35.355.313.000		38.332.793.000		138.626.204.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam kurun waktu tahun 2017-2022 diukur menggunakan berbagai indikator kinerja. Indikator kinerja ini merupakan target-target capain per tahun yang yang diharapkan dapat tercapai sebagai bahan evaluasi. Secara rinci target capain indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel VII.1

Penetapan Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022

No.	Misi/ Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Misi ke 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri							
I	Indikator Tujuan :							
	Pertumbuhan produktivitas komoditas di sektor kelautan dan perikanan	193.19%	2.53	3.31	3.49	4.08	5.43	5.43
II	Indikator Sasaran :							
1	Produktivitas perikanan tangkap	12.6	13.16	13.21	13.27	13.39	13.53	13.53
	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	-33.33%	6.25%	6.67%	7.14%	7.69%	8.33%	8.33%
	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	0%	0.09%	0.09%	0.09%	0.18%	0.26%	0.26%
	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kemenkumham	175.00%	23.08%	25.00%	25%	28.00%	28.13%	28.13%
	Volume ikan yang dilelang di TPI	27,782 ton	28,004.67 ton	28,228.71 ton	28,511.00 ton	28,853.13 ton	29,228.22 ton	29,228.22 ton
2	Produktivitas perikanan budidaya	3.92	3.9	3.9	3.91	3.92	3.93	3.93
	Luasan eksisting lahan mangrove	173.20 Ha	176.88 Ha	180.43 Ha	185.77 Ha	192.11 Ha	199.98 Ha	199.98 Ha
	produksi perikanan budidaya	42,036 ton	42,290 ton	42,400 ton	42,515 ton	42,640 ton	42,775 ton	42,775 ton

No.	Misi/ Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 0 (2017)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 1 (2018)	Tahun 2 (2019)	Tahun 3 (2020)	Tahun 4 (2021)	Tahun 5 (2022)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<i>udang windu</i>	<i>1,025 ton</i>	<i>755</i>	<i>760</i>	<i>770</i>	<i>775</i>	<i>780</i>	<i>780</i>
	<i>bandeng</i>	<i>28,360 ton</i>	<i>28,040</i>	<i>28,050</i>	<i>28,060</i>	<i>28,080</i>	<i>28,100</i>	<i>28,100</i>
	<i>nila salin</i>	<i>486 ton</i>	<i>550</i>	<i>600</i>	<i>650</i>	<i>665</i>	<i>710</i>	<i>710</i>
	<i>lele</i>	<i>10,272 ton</i>	<i>11,510</i>	<i>11,530</i>	<i>11,550</i>	<i>11,600</i>	<i>11,650</i>	<i>11,650</i>
	<i>ikan lain</i>	<i>1,893 ton</i>	<i>1,435</i>	<i>1,460</i>	<i>1,485</i>	<i>1,520</i>	<i>1,535</i>	<i>1,535</i>
	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan tambak dinas	63.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Produktivitas garam rakyat	40.5	74.54	81.5	89.45	99.39	114.3	114.3
	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	0.20%	0.20%	0.30%	0.40%	0.50%	0.60%	0.60%
	Produksi garam	115,638.86 ton	212,858.25 ton	232,725.02 ton	255,429.90 ton	283,811.00 ton	326,382.65 ton	326,382.65 ton
	Pertumbuhan produksi garam	-95.56	7%	NIHIL				7.00%
4	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	3.16%	4.45%	3.51%	3.49%	3.47%	3.71%	3.71%
	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	4.82%	5.52%	6.19%	6.40%	6.67%	7.18%	7.18%
	Produksi olahan ikan	41,465.55 ton	41,881.24 ton	42,090.64 ton	42,301.10 ton	42,512.60 ton	42,725.17 ton	42,725.17 ton
	Pertumbuhan pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	0.00%	6.80%	7.20%	7.50%	8.30%	8.70%	8.70%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Disamping itu Rencana Strategis menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 ini juga memberikan landasan kebijakan operasional bagi Sekretariat, seluruh Bidang dan UPT lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis ini menjadi arah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah bidang kelautan dan perikanan, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka menjawab isu strategis yang sedang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.


Masa berlaku Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yaitu selama 5 (lima) tahun. Karena terjadi perubahan kebijakan, maka Rencana Strategis dilakukan penyesuaian sebagaimana yang telah dijabarkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini.

Demikian Dokumen Perubahan Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pati untuk Tahun 2020-2022.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI SUBIATI, SH MM
A Pembina Tingkat I
NIP. 19720424 199703 2 010